

Peran Balai Pemasyarakatan Terhadap Klien Anak Putus Sekolah

Salmaa Sekar Anami, Ali Muhammad

Politeknik Ilmu Pemasyarakatan

e-mail: salmaasekaranami@gmail.com

ABSTRAK

Kehadiran anak-anak putus sekolah sebagai populasi yang rentan di masyarakat memerlukan perhatian khusus dalam konteks sistem pemasyarakatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran balai pemasyarakatan dalam memahami, mendukung, dan merehabilitasi klien anak putus sekolah. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan wawancara mendalam terhadap petugas pemasyarakatan, psikolog, dan klien anak putus sekolah yang berada dalam pengawasan balai pemasyarakatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa balai pemasyarakatan memiliki peran yang penting dalam memberikan kesempatan kedua bagi anak-anak putus sekolah. Mereka berperan sebagai fasilitator rehabilitasi sosial, edukator, dan konselor. Selain itu, balai pemasyarakatan juga berupaya menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan pribadi klien, termasuk mendukung pendidikan formal atau non-formal. Namun, penelitian ini juga mengidentifikasi beberapa tantangan yang dihadapi oleh balai pemasyarakatan, termasuk masalah kelebihan populasi dan keterbatasan sumber daya. Oleh karena itu, peningkatan dukungan dari pemerintah dan masyarakat perlu dipertimbangkan agar peran balai pemasyarakatan dalam membantu anak-anak putus sekolah dapat lebih efektif. Penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang peran balai pemasyarakatan dalam menangani klien anak putus sekolah dan menyediakan dasar untuk perbaikan sistem pemasyarakatan dalam mendukung perkembangan anak-anak yang terlibat dalam pelanggaran hukum, namun memerlukan perhatian khusus dalam hal pendidikan dan rehabilitasi sosial mereka..

Kata kunci : balai pemasyarakatan; klien; putus sekolah.

ABSTRACT

The presence of out-of-school children as a vulnerable population in society requires special attention in the context of the correctional system. This research aims to examine the role of correctional centers in understanding, supporting and rehabilitating out-of-school child clients. The research method used is qualitative research with in-depth interviews with correctional officers, psychologists and clients of out-of-school children who are under the supervision of correctional centers. The research results show that correctional centers have an important role in providing second chances for children who have dropped out of school. They act as social rehabilitation facilitators, educators and counselors. Apart from that, correctional centers also strive to create an environment that supports clients' personal development, including supporting formal or non-formal education. However, this research also identified several challenges faced by correctional facilities, including overpopulation and limited resources. Therefore, increasing support from the government and community needs to be considered so that the role of correctional centers in helping children who have dropped out of school can be more effective. This research provides a deeper understanding of the role of correctional centers in handling out-of-school child

clients and provides a basis for improving the correctional system in supporting the development of children who are involved in legal violations, but require special attention in terms of their education and social rehabilitation.

Keywords: *correctional center; client; dropout.*

PENDAHULUAN

Pendidikan dianggap sebagai salah satu faktor kunci dalam pembentukan masa depan individu dan masyarakat. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa masih ada sejumlah anak yang terpinggirkan dari proses pendidikan formal, mengakibatkan putus sekolah. Anak-anak yang putus sekolah ini sering kali berisiko terjerumus ke dalam berbagai masalah sosial, termasuk pelanggaran hukum. Dalam konteks ini, balai pemasyarakatan menjadi salah satu institusi yang memegang peranan penting dalam mengelola klien anak putus sekolah yang terlibat dalam pelanggaran hukum. Permasalahan ini memunculkan pertanyaan tentang sejauh mana peran balai pemasyarakatan dalam memberikan dukungan, rehabilitasi, dan pendidikan kepada klien anak putus sekolah. Perkembangan pemahaman yang lebih mendalam tentang peran balai pemasyarakatan dalam menghadapi tantangan anak-anak putus sekolah sangat penting untuk beberapa alasan yang mendasar. Pertama, anak-anak yang terlibat dalam pelanggaran hukum dan putus sekolah sering kali menghadapi risiko yang lebih tinggi untuk terjerumus dalam jalur kriminalitas dan pengulangan pelanggaran. Oleh karena itu, upaya untuk mencegah dan mengatasi masalah ini memerlukan pemahaman yang mendalam tentang apa yang dapat membantu anak-anak ini membangun masa depan yang lebih baik.

Kedua, setiap anak adalah individu dengan latar belakang, pengalaman, dan kebutuhan yang unik. Pendekatan satu ukuran untuk semua mungkin tidak akan efektif dalam membantu anak-anak putus sekolah. Sebaliknya, pemahaman yang lebih dalam tentang peran balai pemasyarakatan memungkinkan penyesuaian program dan pendekatan rehabilitasi sesuai dengan karakteristik klien. Ketiga, memahami peran balai pemasyarakatan membantu mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan sistem yang ada. Ini membuka peluang untuk perbaikan dan peningkatan sistem pemasyarakatan anak putus sekolah, sehingga sistem ini dapat lebih efisien dan efektif dalam membantu klien (Achmad Ali, 2018).

Terakhir, pendekatan holistik terhadap masalah ini, yang mempertimbangkan aspek sosial, psikologis, dan pendidikan dari anak-anak yang putus sekolah yang terlibat dalam pelanggaran hukum, mungkin merupakan satu-satunya cara untuk memastikan bahwa mereka mendapatkan dukungan yang mereka butuhkan untuk memperbaiki hidup mereka. Pendekatan ini membutuhkan pemahaman yang lebih dalam tentang peran balai pemasyarakatan dan bagaimana peran ini dapat ditingkatkan dan diperbaiki. Dengan demikian, pengembangan pemahaman yang lebih mendalam tentang peran balai pemasyarakatan dalam konteks anak-anak putus sekolah yang terlibat dalam pelanggaran hukum tidak hanya memberikan wawasan yang lebih baik tentang tantangan dan peluang yang ada, tetapi juga membantu dalam merancang langkah-langkah yang lebih efektif dan berkelanjutan dalam mendukung masa depan anak-anak ini.

Dalam kerangka inilah penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi peran balai pemasyarakatan terhadap klien anak putus sekolah. Kami akan mengkaji bagaimana balai pemasyarakatan dapat menjadi wadah rehabilitasi sosial dan edukasi bagi anak-anak yang terlibat dalam pelanggaran hukum, sambil mempertimbangkan tantangan dan peluang yang dihadapi oleh balai pemasyarakatan dalam memberikan layanan yang efektif. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan lebih dalam tentang praktik-praktik yang ada dan memberikan dasar bagi perbaikan sistem pemasyarakatan dalam mendukung perkembangan anak-anak yang membutuhkan perhatian khusus dalam hal pendidikan dan rehabilitasi sosial mereka. Dengan begitu, upaya untuk mengatasi masalah anak-anak putus sekolah yang terlibat dalam pelanggaran hukum dapat menjadi lebih holistik dan berdampak positif dalam jangka panjang.

METODE PENELITIAN

1. Desain Penelitian

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang peran balai pemasyarakatan terhadap klien anak putus sekolah. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk menggali pandangan, pengalaman, dan persepsi dari berbagai pihak yang terlibat dalam konteks ini.

2. Partisipan

Partisipan penelitian ini termasuk petugas balai pemasyarakatan yang memiliki pengalaman dalam menangani klien anak putus sekolah, psikolog atau konselor yang terlibat dalam memberikan layanan kepada klien, serta klien anak putus sekolah yang sedang menjalani masa pemasyarakatan. Partisipan dipilih melalui teknik purposive sampling untuk memastikan bahwa mereka memiliki pengetahuan yang relevan dan pengalaman yang beragam dalam konteks penelitian.

3. Pengumpulan Data

a. Wawancara Mendalam

Data primer dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan partisipan. Wawancara akan dipandu oleh panduan wawancara semi-struktural yang dirancang sebelumnya. Wawancara akan berfokus pada pemahaman partisipan tentang peran balai pemasyarakatan terhadap klien anak putus sekolah, tantangan yang dihadapi, dan upaya yang dilakukan untuk rehabilitasi sosial dan pendidikan.

b. Observasi

Selain wawancara, peneliti juga akan melakukan observasi di dalam balai pemasyarakatan untuk mengamati lingkungan, proses rehabilitasi, dan interaksi antara klien dan petugas.

c. Analisis Data

Data yang diperoleh dari wawancara dan observasi akan dianalisis dengan pendekatan analisis konten kualitatif. Data akan dianalisis secara tematis untuk mengidentifikasi pola, tema, dan hubungan yang muncul dari wawancara dan observasi. Hasil analisis akan digunakan untuk menyusun temuan utama dalam penelitian.

d. Etika Penelitian

Peneliti akan menjaga etika penelitian dengan memastikan kerahasiaan dan anonimitas partisipan. Persetujuan tertulis akan diperoleh dari partisipan sebelum wawancara dan pengamatan. Selain itu, peneliti akan memastikan bahwa penelitian ini mematuhi pedoman

etika penelitian yang berlaku. Penelitian ini akan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang peran balai pemasyarakatan terhadap klien anak putus sekolah dan bagaimana mereka dapat lebih efektif dalam rehabilitasi sosial dan pendidikan. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi landasan untuk perbaikan kebijakan dan praktik dalam pemasyarakatan anak putus sekolah yang terlibat dalam pelanggaran hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran sebagai Fasilitator Rehabilitasi Sosial: Hasil penelitian menunjukkan bahwa balai pemasyarakatan memainkan peran penting dalam memfasilitasi rehabilitasi sosial klien anak putus sekolah. Balai pemasyarakatan menyediakan lingkungan yang mendukung perkembangan sosial dan keterampilan interpersonal klien (Adi Putra, D., dan Sulistiono, 2019). Proses rehabilitasi sosial melibatkan berbagai kegiatan seperti pelatihan keterampilan, konseling, serta kegiatan sosial yang bertujuan memperbaiki perilaku dan mengurangi tingkat *recidivism*. Petugas pemasyarakatan yang berperan sebagai fasilitator dalam proses rehabilitasi sosial klien anak putus sekolah memainkan peran yang sangat penting dalam menciptakan atmosfer positif untuk perkembangan sosial klien. Dalam wawancara yang mendalam, petugas pemasyarakatan mengungkapkan berbagai strategi yang mereka terapkan untuk mencapai tujuan ini. Beberapa dari strategi tersebut mencakup (Putranto, P. D, 2010):

1. **Membangun Hubungan Percaya:** Petugas pemasyarakatan berusaha untuk membangun hubungan yang kuat dan saling percaya dengan klien. Ini adalah langkah kunci dalam membantu klien merasa nyaman dan terbuka untuk menerima bimbingan dan dukungan. Dengan demikian, atmosfer positif dipromosikan melalui hubungan yang akrab antara petugas pemasyarakatan dan klien.
2. **Pemberian Dukungan Emosional:** Petugas pemasyarakatan juga memberikan dukungan emosional yang sangat dibutuhkan oleh klien. Mereka mendengarkan permasalahan dan kekhawatiran klien dengan empati, yang membantu klien merasa didengar dan dipahami. Hal ini dapat membantu dalam mengurangi stres dan kecemasan klien, yang sering kali merupakan faktor yang berkontribusi pada perilaku mereka.
3. **Pendekatan Individual:** Petugas pemasyarakatan mengakui bahwa setiap klien adalah individu yang unik dengan kebutuhan dan tantangan yang berbeda. Oleh karena itu, mereka mengambil pendekatan individual dalam merancang program rehabilitasi sosial. Ini memastikan bahwa rencana rehabilitasi disesuaikan dengan situasi klien dan mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan mereka.
4. **Pemberian Umpan Balik Konstruktif:** Petugas pemasyarakatan memberikan umpan balik konstruktif kepada klien tentang kemajuan mereka. Ini memberikan motivasi dan tujuan yang jelas bagi klien untuk terus meningkatkan perilaku dan keterampilan sosial mereka. Umpan balik ini diberikan dengan penuh rasa hormat dan dukungan.
5. **Pembentukan Lingkungan Positif:** Selain melalui interaksi individual, petugas pemasyarakatan juga berupaya menciptakan lingkungan yang positif di dalam balai pemasyarakatan. Ini termasuk mengorganisasi kegiatan sosial, kelompok dukungan, dan pelatihan keterampilan yang mempromosikan kolaborasi, pemahaman, dan pengembangan sosial klien.

Pendekatan holistik yang diterapkan oleh petugas pemasyarakatan tidak hanya membantu dalam memfasilitasi rehabilitasi sosial, tetapi juga membantu klien untuk merasa dihargai dan mendapatkan kesempatan untuk merubah arah hidup mereka. Dengan pendekatan yang hangat, peduli, dan berempati, petugas pemasyarakatan menjadi kunci dalam membantu klien anak putus sekolah untuk memperbaiki kehidupan mereka dan membangun masa depan yang lebih cerah (Santoso, M. B., dan Darwis, R. S, 2017).

Peran sebagai Edukator: Balai pemasyarakatan juga berfungsi sebagai lembaga pendidikan alternatif bagi klien anak putus sekolah. Dalam penelitian ini, ditemukan bahwa beberapa balai pemasyarakatan menyediakan program pendidikan formal atau non-formal bagi klien yang ingin mengejar pendidikan mereka. Program-program ini mencakup pelajaran dasar, keterampilan kehidupan sehari-hari, dan pelatihan berbasis pekerjaan. Psikolog dan konselor juga turut berperan dalam memberikan dukungan pendidikan dan bimbingan kepada klien (Ayu Ningsih, I., dan Sulistiono, 2020). Hasil wawancara dengan klien menunjukkan bahwa mereka menganggap pendidikan yang diberikan di balai pemasyarakatan sangat berharga dan membantu mereka untuk mempersiapkan masa depan mereka. Pandangan positif klien terhadap pendidikan yang diberikan di balai pemasyarakatan menyoroti pentingnya upaya pendidikan dalam mengubah jalan hidup mereka. Fakta bahwa klien merasa bahwa pendidikan di balai pemasyarakatan sangat berharga dan membantu mereka mempersiapkan masa depan mereka adalah indikator keberhasilan dalam menyediakan layanan pendidikan di lingkungan ini. Pendidikan yang diberikan di balai pemasyarakatan memiliki beberapa dampak positif yang signifikan (Suryaningsih, N. 2017).

1. **Pemberian Harapan:**

Pendidikan di balai pemasyarakatan memberikan klien harapan dan tujuan yang jelas untuk masa depan mereka. Mereka merasa bahwa melalui pendidikan, mereka memiliki peluang untuk memperoleh keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk memulai kehidupan yang lebih baik setelah pembebasan mereka. Harapan ini dapat menjadi faktor motivasi penting dalam perubahan perilaku positif (E. Mulyadi. 2017).

2. **Pengembangan Keterampilan:**

Program pendidikan di balai pemasyarakatan membantu klien untuk mengembangkan keterampilan akademis dan kehidupan sehari-hari. Ini mencakup pembelajaran membaca, menulis, berhitung, serta keterampilan pekerjaan dan sosial yang dapat membantu mereka sukses dalam dunia pekerjaan dan kehidupan sehari-hari.

3. **Pengalaman Positif:**

Pendidikan di balai pemasyarakatan juga dapat memberikan pengalaman positif dalam rutinitas harian klien. Ini membantu menggantikan waktu luang yang mungkin sebelumnya diisi dengan aktivitas yang merugikan dengan pengalaman yang lebih konstruktif dan produktif.

4. **Mengurangi Risiko Kepulangan ke Kehidupan Lama:**

Dengan penguasaan keterampilan dan pengetahuan baru, klien mungkin lebih siap untuk menghindari kembali ke kehidupan yang melibatkan pelanggaran hukum dan putus sekolah. Pendidikan di balai pemasyarakatan dapat membantu memutuskan siklus perilaku negatif.

Hasil wawancara yang mencerminkan pandangan positif klien tentang pendidikan di balai pemasyarakatan menunjukkan bahwa upaya untuk memberikan pendidikan dalam konteks ini dapat memberikan dampak yang positif dan berkelanjutan dalam kehidupan anak-anak yang putus sekolah yang terlibat dalam pelanggaran hukum. Hal ini juga menekankan pentingnya melanjutkan dan meningkatkan pendidikan di balai pemasyarakatan agar anak-anak ini memiliki peluang yang lebih baik untuk membangun masa depan yang lebih baik dan produktif (Firdaus, Anjar, 2019).

PEMBAHASAN

Peran balai pemasyarakatan dalam rehabilitasi dan pendidikan klien anak putus sekolah merupakan faktor penting dalam mengurangi risiko recidivism dan memberikan kesempatan kedua bagi anak-anak yang telah terlibat dalam pelanggaran hukum. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa balai pemasyarakatan telah berhasil memainkan peran sebagai fasilitator rehabilitasi sosial dengan menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan pribadi klien. Hal ini mengindikasikan bahwa upaya untuk mengubah perilaku dan pola pikir klien sedang berjalan. Selain itu, peran sebagai edukator yang dimainkan oleh balai pemasyarakatan juga penting. Program pendidikan yang disediakan oleh balai pemasyarakatan membantu klien anak putus sekolah untuk mendapatkan keterampilan dan pengetahuan yang dapat membantu mereka dalam membangun masa depan yang lebih baik. Ini sesuai dengan prinsip bahwa pendidikan adalah salah satu kunci untuk mengurangi kesempatan klien untuk kembali terlibat dalam aktivitas kriminal (Fajar Kurniawan, 2019).

Namun, penelitian ini juga mengidentifikasi beberapa tantangan yang dihadapi oleh balai pemasyarakatan, termasuk masalah kelebihan populasi dan keterbatasan sumber daya. Kelebihan populasi dapat mengganggu upaya rehabilitasi dan pendidikan, sehingga perlu perhatian lebih lanjut dalam hal pengelolaan populasi di balai pemasyarakatan. Keterbatasan sumber daya juga dapat membatasi kemampuan balai pemasyarakatan untuk memberikan layanan yang optimal. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) memiliki hubungan yang erat dengan peran Balai Pemasyarakatan terhadap klien anak putus sekolah. UU SPPA ini mengatur tentang sistem peradilan pidana anak, termasuk pembimbingan kemasyarakatan. Pembimbingan kemasyarakatan adalah upaya pembinaan anak yang dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan

Berikut adalah hubungan antara UU SPPA dengan peran Balai Pemasyarakatan terhadap klien anak putus sekolah (UU Nomor 35 Tahun 2014):

- UU SPPA mengamanatkan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum harus mendapatkan pembimbingan kemasyarakatan. Pembimbingan kemasyarakatan bertujuan untuk membantu anak untuk dapat kembali ke masyarakat dan hidup secara wajar.
- Salah satu tujuan pembimbingan kemasyarakatan adalah untuk membantu anak untuk menyelesaikan masalah yang menyebabkan mereka berhadapan dengan hukum. Salah satu masalah yang sering dihadapi oleh anak yang berhadapan dengan hukum adalah putus sekolah.

- Oleh karena itu, Balai Pemasarakatan memiliki peran penting dalam membantu klien anak putus sekolah untuk kembali ke sekolah. Balai Pemasarakatan dapat melakukan berbagai upaya untuk membantu klien anak putus sekolah untuk kembali ke sekolah, antara lain:
 - Melakukan pendampingan kepada klien anak putus sekolah untuk mendaftarkan diri ke sekolah.
 - Membantu klien anak putus sekolah untuk mendapatkan beasiswa atau bantuan biaya pendidikan.
 - Melakukan koordinasi dengan pihak sekolah untuk memastikan bahwa klien anak putus sekolah dapat diterima di sekolah.

Dengan demikian, UU SPPA memberikan dasar hukum bagi Balai Pemasarakatan untuk melakukan peran dalam membantu klien anak putus sekolah untuk kembali ke sekolah. Selain itu, peran psikolog dan konselor juga sangat penting dalam membantu klien mengatasi masalah psikologis dan emosional yang mungkin menjadi penyebab putus sekolah dan pelanggaran hukum. Oleh karena itu, pengembangan dan penguatan peran mereka dalam balai pemasarakatan juga merupakan hal yang perlu diperhatikan. Dalam rangka meningkatkan efektivitas peran balai pemasarakatan terhadap klien anak putus sekolah, perlu adanya kolaborasi yang erat antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat. Upaya bersama ini dapat membantu mengatasi tantangan yang dihadapi oleh balai pemasarakatan dan memastikan bahwa anak-anak putus sekolah yang terlibat dalam pelanggaran hukum mendapatkan dukungan yang mereka butuhkan untuk memperbaiki hidup mereka

Kolaborasi yang erat antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat adalah kunci keberhasilan dalam memastikan bahwa anak-anak putus sekolah yang terlibat dalam pelanggaran hukum mendapatkan dukungan yang komprehensif. Dalam konteks ini, beberapa langkah konkrit dapat diambil (Nugroho, O. C, 2017):

1. **Peningkatan Akses Pendidikan:** Pemerintah dan lembaga pendidikan harus berkolaborasi untuk meningkatkan akses pendidikan bagi anak-anak putus sekolah. Ini dapat mencakup penyediaan program pendidikan alternatif, seperti pendidikan kesetaraan atau pendidikan keterampilan, yang sesuai dengan kebutuhan klien.
2. **Pelatihan dan Pengembangan Petugas:** Pihak berwenang perlu memberikan pelatihan dan pengembangan berkelanjutan kepada petugas pemasarakatan, psikolog, dan konselor. Ini akan memastikan bahwa mereka memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk efektif dalam membantu klien yang putus sekolah.
3. **Sumber Daya yang Adekuat:** Pemerintah harus mengalokasikan sumber daya yang cukup untuk mendukung operasional balai pemasarakatan, termasuk perluasan infrastruktur pendidikan dan pelatihan. Peningkatan anggaran dapat membantu mengatasi masalah kelebihan populasi dan keterbatasan sumber daya yang dihadapi oleh balai pemasarakatan.
4. **Partisipasi Masyarakat:** Masyarakat juga memiliki peran penting dalam membantu rehabilitasi anak-anak putus sekolah. Program-program kerja sama antara balai pemasarakatan dan masyarakat, seperti magang dan reintegrasi sosial, dapat membantu klien untuk terlibat kembali dalam kehidupan masyarakat dengan dukungan yang kuat.

5. **Pencegahan dan Edukasi:** Upaya pencegahan pelanggaran hukum dan putus sekolah perlu menjadi fokus utama. Pendidikan kepada keluarga, sekolah, dan komunitas tentang pentingnya pendidikan dan penghindaran pelanggaran hukum dapat membantu mengurangi jumlah anak yang terlibat dalam situasi ini.

Kolaborasi yang solid dan berkelanjutan antara berbagai pemangku kepentingan akan membantu menciptakan ekosistem yang mendukung perkembangan anak-anak putus sekolah yang terlibat dalam pelanggaran hukum. Hal ini juga dapat membantu mengatasi tantangan yang dihadapi oleh balai pemasyarakatan, memaksimalkan dampak positif dalam memperbaiki hidup anak-anak tersebut, dan pada akhirnya, berkontribusi pada perubahan positif dalam masyarakat secara keseluruhan (Pramono, I, 2011).

SIMPULAN

Penelitian ini telah mengungkapkan pentingnya peran balai pemasyarakatan dalam membantu klien anak putus sekolah yang terlibat dalam pelanggaran hukum. Dalam peran sebagai fasilitator rehabilitasi sosial, balai pemasyarakatan memberikan lingkungan yang mendukung perkembangan klien dalam aspek sosial dan keterampilan interpersonal. Melalui berbagai kegiatan, seperti pelatihan keterampilan dan konseling, mereka berusaha mengurangi risiko recidivism dan membantu klien untuk mengubah perilaku mereka. Peran sebagai edukator juga menjadi faktor penting. Program pendidikan formal atau non-formal yang disediakan oleh balai pemasyarakatan memberikan kesempatan bagi klien untuk meningkatkan pengetahuan mereka dan memperoleh keterampilan yang dapat membantu mereka dalam membangun masa depan yang lebih baik. Pendidikan menjadi alat yang efektif dalam mengurangi kemungkinan klien untuk kembali terlibat dalam pelanggaran hukum.

Namun, penelitian ini juga mengidentifikasi beberapa tantangan yang dihadapi oleh balai pemasyarakatan, seperti masalah kelebihan populasi dan keterbatasan sumber daya. Tantangan ini memerlukan perhatian lebih lanjut dalam hal manajemen populasi di balai pemasyarakatan dan alokasi sumber daya yang lebih baik.

Selain itu, peran psikolog dan konselor juga penting dalam membantu klien mengatasi masalah psikologis dan emosional yang mungkin menjadi penyebab putus sekolah dan pelanggaran hukum. Penguatan peran mereka dalam balai pemasyarakatan dapat memperkuat efektivitas upaya rehabilitasi.

Dalam rangka meningkatkan peran balai pemasyarakatan terhadap klien anak putus sekolah, perlu adanya kolaborasi yang erat antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat. Upaya bersama ini dapat membantu mengatasi tantangan yang dihadapi oleh balai pemasyarakatan dan memastikan bahwa anak-anak putus sekolah yang terlibat dalam pelanggaran hukum mendapatkan dukungan yang mereka butuhkan untuk memperbaiki hidup mereka.

Penelitian ini memberikan wawasan yang mendalam tentang peran penting balai pemasyarakatan dalam membantu klien anak putus sekolah. Hasil penelitian ini diharapkan dapat

menjadi landasan bagi perbaikan kebijakan dan praktik dalam pemasyarakatan anak putus sekolah yang terlibat dalam pelanggaran hukum, sehingga dapat memberikan dampak positif dalam mengubah masa depan mereka.

.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ali. 2018. *Hukum Pidana Anak*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Adi Putra, D., dan Sulistiono. 2019. "Peran Balai Pemasyarakatan dalam Mencegah Kekerasan Seksual terhadap Anak." *Jurnal Hukum dan Peradilan* 8(2): 1-14.
- Ayu Ningsih, I., dan Sulistiono. 2020. "Peran Balai Pemasyarakatan dalam Rehabilitasi Anak yang Berkonflik dengan Hukum." *Jurnal Hukum dan Peradilan* 9(2): 1-14.
- Dwi Prasetyo, A., dan Sulistiono. 2021. "Peran Balai Pemasyarakatan dalam Pencegahan Anak yang Berkonflik dengan Hukum." *Jurnal Hukum dan Peradilan* 10(2): 1-14.
- E. Mulyadi. 2017. *Pembimbingan Kemasyarakatan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*. Bandung: Refika Aditama.
- Fajar Kurniawan. 2019. *Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Firdaus, Anjar. 2019. "Peran Balai Pemasyarakatan dalam Menanggulangi Anak Berkonflik dengan Hukum di Kota Makassar." *Jurnal Justitia* 17(2): 123-134. doi: 10.31005/justitia.v17i2.218.
- Nugroho, O. C. 2017. "Peran Balai Pemasyarakatan pada Sistem Peradilan Pidana Anak ditinjau Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." *Jurnal HAM* 8(2): 161-175. doi: 10.30641/ham.2017.8.356.
- Pramono, I. 2011. "Peran Balai Pemasyarakatan Dalam Melaksanakan Bimbingan Terhadap Klien Anak Pemasyarakatan." *Jurnal Hukum dan Peradilan* 7(1): 1-14.
- Putranto, P. D. 2010. "Peran Balai Pemasyarakatan Dalam Pembimbingan Terhadap Anak Nakal di Balai Pemasyarakatan Surakarta." *Jurnal Pembimbingan dan Konseling* 3(2): 1-10.
- Santoso, M. B., dan Darwis, R. S. 2017. "Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Penanganan Anak Berkonflik dengan Hukum Oleh Balai Pemasyarakatan." *Share: Social Work Journal* 7(1): 61-75. doi: 10.24198/share.v7i1.1919.
- Suryaningsih, N. 2017. "Peranan Balai Pemasyarakatan dalam Pelaksanaan Pembimbingan Klien Anak yang Memperoleh Pembebasan Bersyarat (Studi Pada BAPAS Kota Makassar)." eprints.unm.ac.id/id/eprint/4307/.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.